



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

Jakarta, 09 September 2025

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Di –

Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : 2836/KPTUN.W2.TUN1/PW1.1.1/IX/2025

Bersama ini dikirimkan dengan hormat, laporan bulanan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bulan Agustus 2025 bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai bahan evaluasi dan monitoring pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, demi meningkatkan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa.

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Ketua PTUN Jakarta



HUSBAN

Tembusan :

1. Arsip





PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



LAPORAN BULANAN BULAN AGUSTUS 2025

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Contact Us
(021) 22859672



More Information
www.ptun-jakarta.go.id



Our Office
**Jl. A. Sentra Primer Baru Timor
Pulo Gebang, Jakarta Timur**



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	18
BAB III. TELAAHAN	26
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	27



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

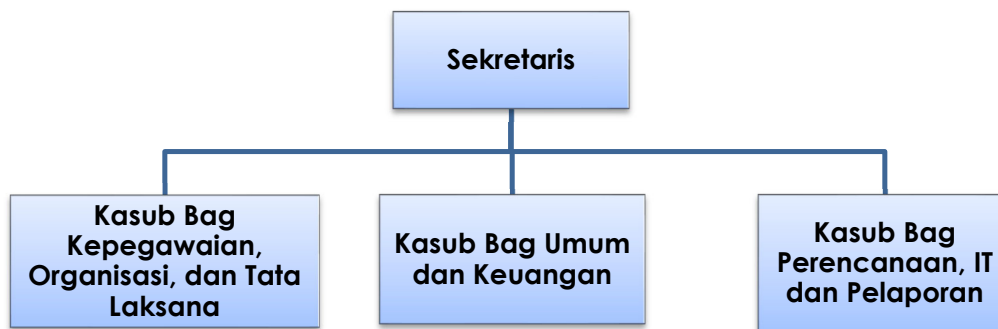
BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprass di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

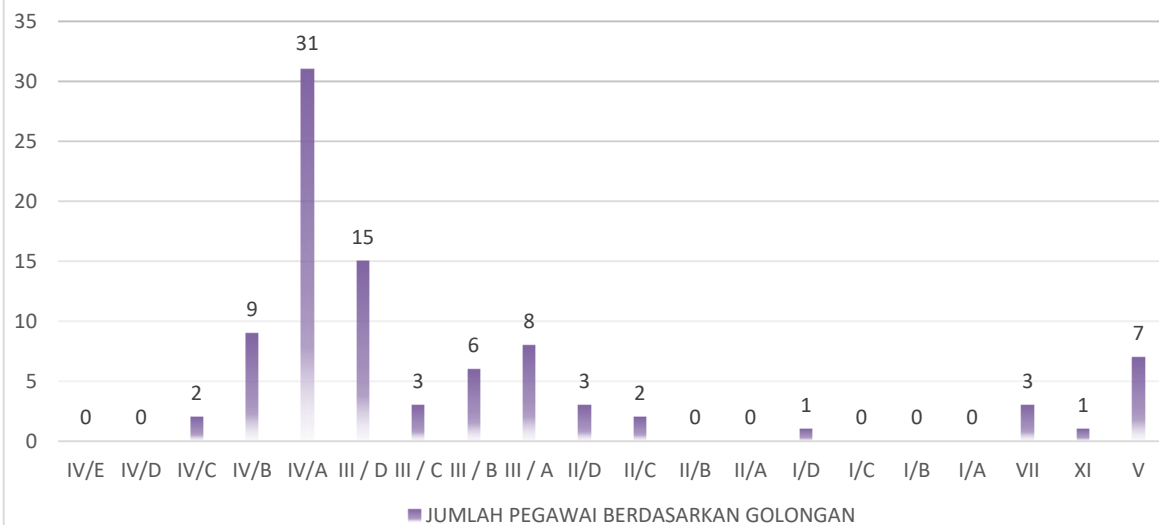
Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Agustus 2025 adalah 76 Orang PNS, 4 orang CPNS, 11 Orang PPPK (P3K), yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 59 orang dan Perempuan 32 Orang.

Adapun rinciannya sebagai berikut :



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	H. Husban, S.H., M.H. NIP.197212231992031002	Ketua PTUN Bandung	Ketua PTUN Jakarta	Tmt 11 Agustus 2025
2.	Hari Sunaryo, S.H. NIP.197806192006041001	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Jakarta	Tmt 11 Agustus 2025
3.	Meita Sandra Merly Lengkong, S.H. NIP.198205182006042001	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Jakarta	Tmt 11 Agustus 2025
4.	Rachmadi, S.H. NIP.197610092006041003	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Jakarta	Tmt 04 Agustus 2025
5.	Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H. NIP.198212312007041001	Hakim PTUN Medan	Hakim PTUN Jakarta	Tmt 11 Agustus 2025
6.	Pulung Hudoprakoso, S.H., M.H. NIP.197703172007041001	Hakim PTUN Semarang	Hakim PTUN Jakarta	Tmt 14 Agustus 2025



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.	Ketua PTUN Jakarta	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Surabaya	TMT 08 Agustus 2025

DATA HAKIM / PEGAWAI BARU:

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	KET
1.	H. Husban, S.H., M.H.	KETUA		TMT 11 Agustus 2025
2.	Hari Sunaryo, S.H.	HAKIM		TMT 11 Agustus 2025
3.	Meita Sandra Merly Lengkong, S.H.	HAKIM		TMT 11 Agustus 2025
4.	Rachmadi, S.H.	HAKIM		TMT 04 Agustus 2025
5.	Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H.	HAKIM		TMT 11 Agustus 2025
6.	Pulung Hudoprakoso, S.H., M.H.	HAKIM		TMT 14 Agustus 2025
7.	Hasyim, S.H.	Penata Layanan Operasional	Panitera Muda Hukum	TMT 29 Agustus 2025
8.	Heru Setiawan, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	TMT 29 Agustus 2025
9.	Mohamad Rizal Muslim, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	TMT 29 Agustus 2025



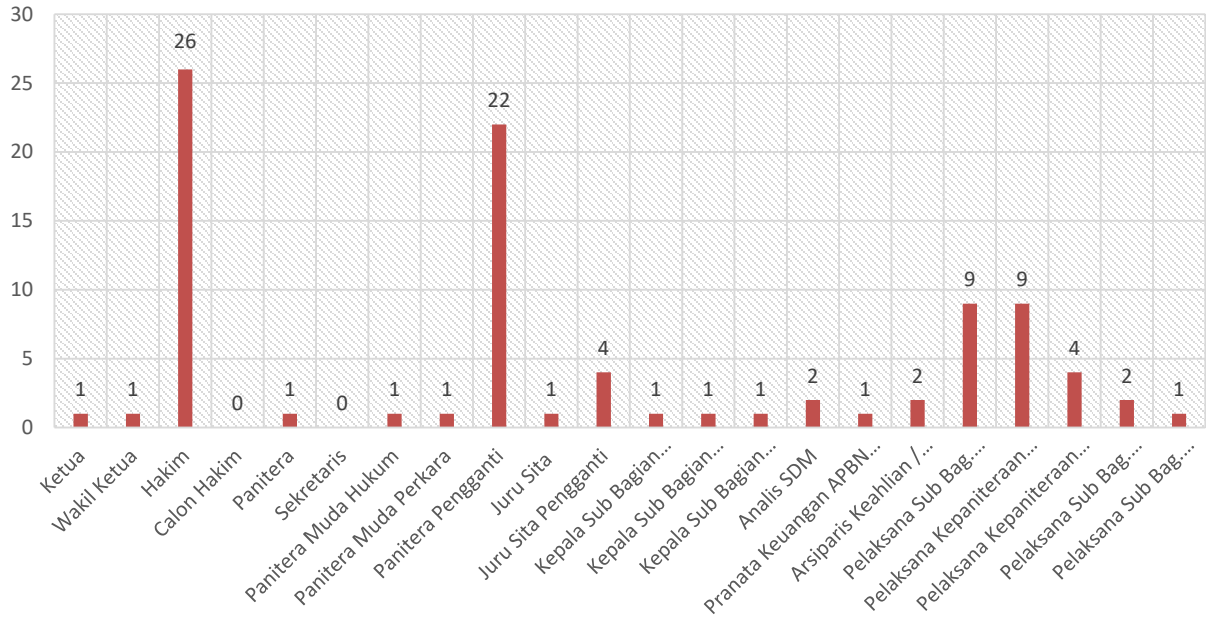
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

10.	Mamat Nurahmat	Operator Layanan Operasional	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	TMT 29 Agustus 2025
11.	Asep Saepudin	Operator Layanan Operasional	Sub Bagian Umum dan Keuangan	TMT 29 Agustus 2025
12.	Dela Wahyudin	Operator Layanan Operasional	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	TMT 29 Agustus 2025
13.	Jana Amelia Lumban Tobing	Operator Layanan Operasional	Panitera Muda Perkara	TMT 29 Agustus 2025
14.	Bagus Nur Ronggo Pameling	Operator Layanan Operasional	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	TMT 29 Agustus 2025
15.	Rangga Nurhidayat	Operator Layanan Operasional	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	TMT 29 Agustus 2025
16.	Devika Rahmanda	Operator Layanan Operasional	Panitera Muda Perkara	TMT 29 Agustus 2025

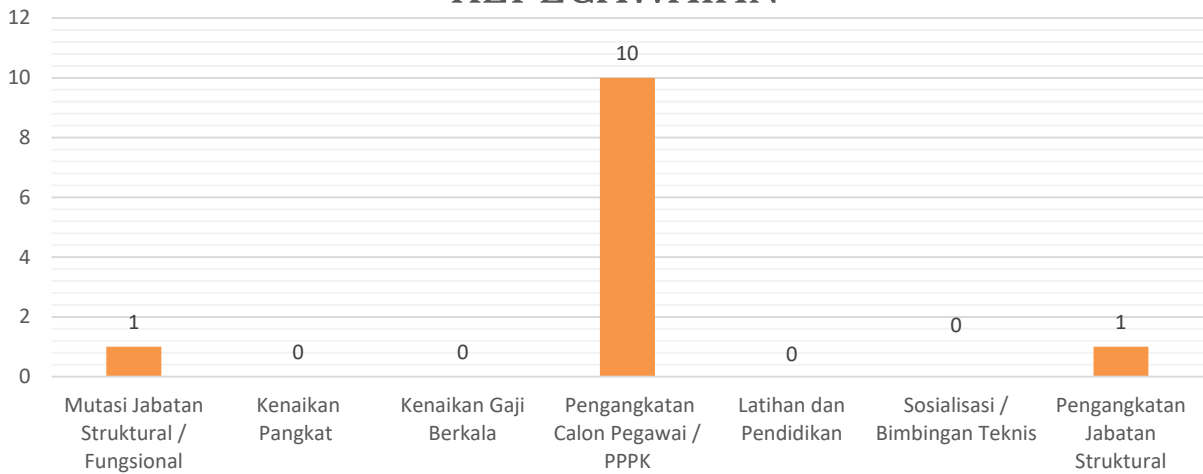


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Masuk

NO	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	PERSURATAN	MAHKAMAH AGUNG RI	4	0	0	4
2		PT. TUN-Jakarta	1	0	0	1
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	10	0	0	10
4		DIRJEND. BADIMIL TUN	0	0	4	4
5		KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0
6		PERKARA/LAIN-LAIN	57	0	0	57
7		UMUM/LAIN-LAIN	10	0	0	10
TOTAL						86

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	105	0	0	105
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	23	0	0	23
3	Sub.Perencanaan, TI, dan Pelaporan	9	0	0	9
4	Kepaniteraan Muda Perkara	153	0	0	153
5	Kepaniteraan Muda hukum	19	0	0	19
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					309

2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Untuk bulan Agustus Tahun 2025 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

No	Nama Barang	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
1	A.C. Split	4		28	32
2	Acces Point	5			5
3	Air Conditioning (AC)	18			18
4	Amplifier			3	3
5	Asbak Tinggi			1	1
6	Audio Mixing Console	1			1
7	Bangku Panjang Besi/Metal	7		17	24
8	Bracket Standing Peralatan	8			8
9	Brandkas			1	1
10	Buffet			1	1
11	Buku Lainnya	18			18
12	Camera Conference	1			1
13	Camera Digital	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	26			26
15	Digital LED Running Text	1			1
16	Dispenser	7			7
17	Facsimile	2			2
18	Filing Cabinet Besi	41		1	42
19	Filing Sealing	73			73
20	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	4			4
21	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
22	Genset	1			1
23	Jam Mekanis			6	6
24	Kipas Angin		3		3
25	Komponen/Alat Pengolah Data	26			26
26	Komputer Jaringan Lainnya	29			29
27	Kursi Besi/Metal	606		1	607
28	Kursi Kayu	55		14	69
29	Lambang Garuda Pancasila	6			6
30	Lambang Instansi	7			7
31	Lap Top	9			9
32	Layar Film/Projector	1			1
33	LCD Monitor	1			1
34	LCD Projector/Infocus	1			1
35	Lemari Besi/Metal	17	8	7	32
36	Lemari Kayu	2		22	24
37	Lemari Penyimpan	35			35
38	Loudspeaker	4		5	9
39	Meja Kerja Kayu	173		28	201
40	Meja Komputer			3	3
41	Meja Makan Besi	5			5
42	Meja Rapat	39			39
43	Meja Resepsionis	1		1	2
44	Mesin Absensi	1			1



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

45	Mesin Antrian	2			2
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
47	Microphone	13			13
48	Microphone/Wireless MIC	1			1
49	Mimbar/Podium	1			1
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			1
51	Mixer	3			3
52	Mixer Sound Sistem	1			1
53	Modem	1			1
54	Monografi	2			2
55	Movitex Board	1			1
56	Note Book	23			23
57	P.C Unit	42			42
58	Palu Sidang	1		5	6
59	Panggung	2			2
60	Papan Gambar	1			1
61	Papan Pengumuman	6			6
62	Peralatan Komputer Lainnya	2			2
63	Perkakas Kantor Lainnya	10			10
64	Pesawat Telephone	18		24	42
65	Piagam	3			3
66	Piala	12			12
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29		10	39
68	Public Address Branch Exchange (PABX)	1			1
69	Rak Besi	134		22	156
70	Rak Server	1			1
71	Router	5			5
72	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		2		2
73	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2	2	4
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8			8
75	Sedan	2		1	3
76	Sepeda Motor	7	1		8
77	Server	3			3
78	Sofa	27			27
79	Software Komputer		4		4
80	Sound System	1			1
81	Stempel Timbul/Bulat	1			1
82	Tabung Pemadam Api	9			9
83	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1			1
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4			4
85	Tangga Aluminium	1			1
86	Telepon Digital	4			4
87	Televisi			1	1
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1		1	2
89	Wireless	1			1
90	Workstation	1			1
	Total	1626	20	205	1851

Note : Tabung Pemadam Api berjumlah 24 Tabung, 12 tabung expired 2027, 12 tabung expired agustus 2025. baru terdaftar di siman 9 tabung.

Sedang berkoordinasi dengan biro perlengkapan terkait penangannya.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

4) Perpustakaan :

Untuk Bulan Agustus 2025 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Agustus 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	16,856,758,000	0	12,679,516,255	1,370,455,644	14,049,971,899	83.35 %	2,806,786,101
WA Program Dukungan Manajemen	16,856,758,000	0	12,679,516,255	1,370,455,644	14,049,971,899	83.35 %	2,806,786,101
WA 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
053.0A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
000001.AC 2 PK	89,690,000	0	89,600,000	0	89,600,000	99.90 %	90,000
000002. Mesin Antrian Sidang	50,000,000	0	49,900,000	0	49,900,000	99.80 %	100,000
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	16,717,068,000	0	12,540,016,255	1,370,455,644	13,910,471,899	83.21 %	2,806,596,101
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	16,717,068,000	0	12,540,016,255	1,370,455,644	13,910,471,899	83.21 %	2,806,296,101
EBA.962 Layanan Umum	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
051.0A Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomputer	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomputer	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
000095. Printer Hp Laserjet P1102	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	16,716,068,000	0	12,540,016,255	1,370,455,644	13,910,471,899	83.22 %	2,805,596,101
001 Gaji dan Tunjangan	14,018,311,000	0	10,953,901,137	1,165,126,136	12,119,027,273	86.45 %	1,899,283,727
001.0A GAJI DAN TUNJANGAN	14,018,311,000	0	10,953,901,137	1,165,126,136	12,119,027,273	86.45 %	1,899,283,727
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4,083,395,000	0	3,499,223,840	329,768,200	3,828,992,040	93.77 %	254,402,960
000003. Belanja Gaji Pokok PNS	3,383,449,000	0	2,799,933,100	329,768,200	3,129,701,300	92.50 %	253,747,700
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	347,973,000	0	347,322,120	0	347,322,120	99.81 %	650,880
000005. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	351,973,000	0	351,968,620	0	351,968,620	100.00 %	4,380
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	61,000	0	43,170	3,929	47,099	77.21 %	13,901
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS	51,000	0	34,066	3,929	37,995	74.50 %	13,005

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Agustus 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	5,000	0	4,408	0	4,408	88.16 %	592
000008. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	5,000	0	4,696	0	4,696	93.92 %	304
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	370,204,000	0	259,008,526	25,167,838	284,176,364	76.76 %	86,027,636
000009. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	317,710,000	0	207,306,394	25,167,838	232,474,232	73.17 %	85,235,768
000010. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	26,247,000	0	26,042,226	0	26,042,226	99.22 %	204,774
000011. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 14)	26,247,000	0	25,659,906	0	25,659,906	97.76 %	587,094
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	120,138,000	0	84,002,578	8,733,800	92,736,378	77.19 %	27,401,622
000012. Belanja Tunjangan Anak PNS	103,228,000	0	67,302,294	8,733,800	76,036,094	73.66 %	27,191,906
000013. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	8,455,000	0	8,444,266	0	8,444,266	99.87 %	10,734
000014. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	8,455,000	0	8,256,018	0	8,256,018	97.65 %	198,982
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	43,200,000	0	28,800,000	1,620,000	30,420,000	70.42 %	12,780,000
000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS	37,440,000	0	23,040,000	1,620,000	24,660,000	65.87 %	12,780,000
000016. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00 %	0
000017. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00 %	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	878,142,000	0	726,370,000	13,265,000	739,635,000	84.23 %	138,507,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS	851,005,000	0	699,360,000	13,265,000	712,625,000	83.74 %	138,380,000
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	13,600,000	0	13,505,000	0	13,505,000	99.30 %	95,000
000020. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	13,537,000	0	13,505,000	0	13,505,000	99.76 %	32,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	122,197,000	0	105,044,699	167,930	105,212,629	86.10 %	16,984,371
000021. Belanja Tunj. PPh. PNS	96,434,000	0	79,283,594	167,930	79,451,524	82.39 %	16,982,476
000022. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	13,210,000	0	13,208,943	0	13,208,943	99.99 %	1,057
000023. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	12,553,000	0	12,552,162	0	12,552,162	99.99 %	838
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	180,398,220	17,453,220	197,851,440	76.83 %	59,673,560
000024. Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	180,398,220	17,453,220	197,851,440	76.83 %	59,673,560
511129 Belanja Uang Makan PNS	1,001,611,000	0	333,403,000	60,870,000	394,273,000	39.36 %	607,338,000
000025. Gol IV (29 org x 22 hr x 12 Bln)	340,013,000	0	155,513,000	31,857,000	187,370,000	55.11 %	152,643,000
000026. Gol III (60 org x 22 Hr x 12 Bln)	559,958,000	0	160,950,000	24,568,000	185,518,000	33.13 %	374,440,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Agustus 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000027. Gol II (10 org x 22 Hr x 12 Bln)	92,400,000	0	13,440,000	3,640,000	17,080,000	18.48 %	75,320,000
000028. Gol I (1 org x 22 Hr x 12 Bln)	9,240,000	0	3,500,000	805,000	4,305,000	46.59 %	4,935,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	73,654,000	0	47,565,000	2,940,000	50,505,000	68.57 %	23,149,000
000029. Belanja Tunjangan Umum PNS	63,845,000	0	37,975,000	2,940,000	40,915,000	64.08 %	22,930,000
000030. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	4,902,000	0	4,795,000	0	4,795,000	97.82 %	107,000
000031. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	4,907,000	0	4,795,000	0	4,795,000	97.72 %	112,000
511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,147,339,000	0	857,159,200	82,659,931	939,819,131	81.91 %	207,519,869
000100. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara	796,864,000	0	506,685,551	82,659,931	589,345,482	73.96 %	207,518,518
000101. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 13)	177,014,000	0	177,013,108	0	177,013,108	100.00 %	892
000102. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 14)	173,461,000	0	173,460,541	0	173,460,541	100.00 %	459
511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5,858,700,000	0	4,796,500,000	618,300,000	5,414,800,000	92.42 %	443,900,000
000097. Belanja Tunjangan Pejabat Negara (gaji ke 13)	1,062,200,000	0	1,062,200,000	0	1,062,200,000	100.00 %	0
000098. Belanja Tunjangan Pejabat Negara (gaji ke 14)	522,100,000	0	522,100,000	0	522,100,000	100.00 %	0
000099. Belanja Tunjangan Pejabat Negara	4,274,400,000	0	3,212,200,000	618,300,000	3,830,500,000	89.61 %	443,900,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	39,600,000	0	28,588,000	2,948,800	31,536,800	79.64 %	8,063,200
000032. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2,859,000	0	2,858,800	0	2,858,800	99.99 %	200
000033. Belanja Gaji Pokok PPPK	33,882,000	0	22,870,400	2,948,800	25,819,200	76.20 %	8,062,800
000034. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2,859,000	0	2,858,800	0	2,858,800	99.99 %	200
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	704	68	772	11.03 %	6,228
000035. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920
000036. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920
000037. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	544	68	612	12.24 %	4,388
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,704,000	0	0	0	0	0.00 %	3,704,000
000038. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	264,000	0	0	0	0	0.00 %	264,000
000039. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,176,000	0	0	0	0	0.00 %	3,176,000
000040. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	264,000	0	0	0	0	0.00 %	264,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Agustus 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,480,000	0	0	0	0	0.00 %	1,480,000
000041. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,270,000	0	0	0	0	0.00 %	1,270,000
000042. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	105,000	0	0	0	0	0.00 %	105,000
000043. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	105,000	0	0	0	0	0.00 %	105,000
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	3,500,000	350,000	3,850,000	78.57 %	1,050,000
000044. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,200,000	0	2,800,000	350,000	3,150,000	75.00 %	1,050,000
000045. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00 %	0
000046. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00 %	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,054,000	0	724,200	72,420	796,620	19.65 %	3,257,380
000047. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,476,000	0	579,360	72,420	651,780	18.75 %	2,824,220
000048. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	289,000	0	72,420	0	72,420	25.06 %	216,580
000049. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	289,000	0	72,420	0	72,420	25.06 %	216,580
511628 Belanja Uang Makan PPPK	8,400,000	0	3,570,000	805,000	4,375,000	52.08 %	4,025,000
000050. Belanja Uang Makan PPPK	8,400,000	0	3,570,000	805,000	4,375,000	52.08 %	4,025,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,697,757,000	0	1,586,115,118	205,329,508	1,791,444,626	66.40 %	906,312,374
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	789,561,000	0	480,444,165	53,666,958	534,111,123	67.65 %	255,449,877
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	789,561,000	0	480,444,165	53,666,958	534,111,123	67.65 %	255,449,877
000051. Keperluan sehari-hari Perkantoran	26,474,000	0	21,032,091	71,958	21,104,049	79.72 %	5,369,951
000052. Prambuktaki (6 org x 12 bulan)	367,488,000	0	204,160,000	25,520,000	229,680,000	62.50 %	137,808,000
000053. Satpam (5 org x 12 Bln)	336,900,000	0	196,553,074	28,075,000	224,628,074	66.67 %	112,271,926
000054. THR Prambuktaki 6 Org X 1 Bln)	30,624,000	0	30,624,000	0	30,624,000	100.00 %	0
000055. THR Satpam (5 org X 1 bln)	28,075,000	0	28,075,000	0	28,075,000	100.00 %	0
002.0B LANGGANAN DAYA JASA	236,400,000	0	221,931,924	144,000	222,075,924	93.94 %	14,324,076
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	196,600,000	0	191,389,526	0	191,389,526	97.35 %	5,210,474
000056. Langganan Internet	190,000,000	0	189,960,000	0	189,960,000	99.98 %	40,000
000057. Lisensi Video Conference	6,600,000	0	1,429,526	0	1,429,526	21.66 %	5,170,474
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,800,000	0	2,235,000	144,000	2,379,000	49.56 %	2,421,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Halaman 12 dari 27 halaman
Laporan Bulanan Bulan Agustus 2025 PTUN JAKARTA
Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Agustus 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000058. Biaya Pengiriman Surat Dinas	4,800,000	0	2,235,000	144,000	2,379,000	49.56 %	2,421,000
522112 Belanja Langganan Telepon	6,000,000	0	2,327,398	0	2,327,398	38.79 %	3,672,602
000059. Langganan Telephone	6,000,000	0	2,327,398	0	2,327,398	38.79 %	3,672,602
522113 Belanja Langganan Air	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
000060. Langganan Air	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
522141 Belanja Sewa	26,000,000	0	25,980,000	0	25,980,000	99.92 %	20,000
000061. Langganan Web Hosting	26,000,000	0	25,980,000	0	25,980,000	99.92 %	20,000
002.0C Pemeliharaan Kantor	536,952,000	0	361,213,046	11,679,500	372,892,546	69.45 %	164,059,454
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189,852,000	0	189,628,600	0	189,628,600	99.88 %	223,400
000062. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	189,852,000	0	189,628,600	0	189,628,600	99.88 %	223,400
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45,000,000	0	0	0	0	0.00 %	45,000,000
000063. Pemeliharaan Rumah Dinas (4 Unit)	45,000,000	0	0	0	0	0.00 %	45,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302,100,000	0	171,584,446	11,679,500	183,263,946	60.66 %	118,836,054
000064. Pemeliharaan Lift	54,500,000	0	54,390,000	0	54,390,000	99.80 %	110,000
000065. Bensin Mobil Sewa Ketua	20,000,000	0	13,278,625	1,200,000	14,478,625	72.39 %	5,521,375
000066. Pemeliharaan AC Cassele	30,000,000	0	29,257,300	0	29,257,300	97.52 %	742,700
000067. Pemeliharaan Laptop	14,600,000	0	1,360,000	2,986,500	4,346,500	29.77 %	10,253,500
000068. Pemeliharaan PC	31,390,000	0	3,000,000	0	3,000,000	9.56 %	28,390,000
000069. Pemeliharaan Printer	20,700,000	0	0	3,218,000	3,218,000	15.55 %	17,482,000
000070. Pemeliharaan AC Split	28,060,000	0	25,109,950	0	25,109,950	89.49 %	2,950,050
000071. Pemeliharaan Mesin Pompa	7,350,000	0	6,900,000	0	6,900,000	93.88 %	450,000
000072. Kendaraan Roda 2	14,000,000	0	816,900	475,000	1,291,900	9.23 %	12,708,100
000073. Kendaraan Roda 4	76,000,000	0	37,471,671	1,850,000	39,321,671	51.74 %	36,678,329
000103. Pemeliharaan Barang Elektronik Lainnya	5,500,000	0	0	1,950,000	1,950,000	35.45 %	3,550,000
002.0D Operasional Lainnya	239,914,000	0	66,643,663	5,919,050	72,562,713	30.25 %	167,351,287
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	90,904,000	0	0	0	0	0.00 %	90,904,000
000074. Pakaian Dinas Pramubhakti	4,428,000	0	0	0	0	0.00 %	4,428,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Agustus 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000075. Pakaian Dinas Hakim 26 Org	21,788,000	0	0	0	0	0.00 %	21,788,000
000076. Pakaian Dinas Pegawai 60 Org	57,984,000	0	0	0	0	0.00 %	57,984,000
000077. Pakaian Dinas CPNS 2 Org	1,676,000	0	0	0	0	0.00 %	1,676,000
000078. Pakaian Dinas PPPK 1 Org	838,000	0	0	0	0	0.00 %	838,000
000079. Pakaian Dinas Satpam	4,190,000	0	0	0	0	0.00 %	4,190,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,760,000	0	37,440,000	1,800,000	39,240,000	48.59 %	41,520,000
000080. Honor PPABP	5,880,000	0	0	0	0	0.00 %	5,880,000
000081. Honor KPA	21,600,000	0	10,800,000	1,800,000	12,600,000	58.33 %	9,000,000
000082. Honor PPK	21,000,000	0	10,500,000	0	10,500,000	50.00 %	10,500,000
000083. Honor Penguji Tagihan Penandatanganan SPM	9,000,000	0	4,500,000	0	4,500,000	50.00 %	4,500,000
000084. Honor Bendahara Penerimaan	3,600,000	0	1,800,000	0	1,800,000	50.00 %	1,800,000
000085. Honor Bendahara Pengeluaran	7,920,000	0	3,960,000	0	3,960,000	50.00 %	3,960,000
000086. Honor Staf Keuangan (2 org x 12 Bln)	11,760,000	0	5,880,000	0	5,880,000	50.00 %	5,880,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	68,250,000	0	29,203,663	4,119,050	33,322,713	48.82 %	34,927,287
000087. Biaya perkantoran sehari-hari (91 Org)	68,250,000	0	29,203,663	4,119,050	33,322,713	48.82 %	34,927,287
002.0G Konsultasi ke Pusat/Tingkat Bandoing	23,325,000	0	992,000	0	992,000	4.25 %	22,333,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,200,000	0	992,000	0	992,000	4.47 %	21,208,000
000088. Transportasi (2 org x 3 kegiatan)	2,700,000	0	0	0	0	0.00 %	2,700,000
000089. Uang Harian (2 org x 3 hari x 3 kegiatan)	4,950,000	0	0	0	0	0.00 %	4,950,000
000090. Tiket (2 org x 2 hari x 3 kegiatan)	8,250,000	0	0	0	0	0.00 %	8,250,000
000091. Penginapan (2 org x 2 hari x 3 kegiatan)	6,300,000	0	992,000	0	992,000	15.75 %	5,308,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,125,000	0	0	0	0	0.00 %	1,125,000
000092. Perjalanan Dinas Dalam Kota (3 Org x 5 keg)	1,125,000	0	0	0	0	0.00 %	1,125,000
002.0H Konsultasi ke KPPN/KAN/WIL DJPb/KPK/IL/KAN/WIL DJK/IBK/IBKD	1,125,000	0	120,320	0	120,320	10.70 %	1,004,680
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,125,000	0	120,320	0	120,320	10.70 %	1,004,680
000093. Perjalanan Dinas Dalam Kota (3 Org x 5 keg)	1,125,000	0	120,320	0	120,320	10.70 %	1,004,680
002.0I Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	870,480,000	0	454,770,000	133,920,000	588,690,000	67.63 %	281,790,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Halaman 13 dari 27 halaman
Laporan Bulanan Bulan Agustus 2025 PTUN JAKARTA
Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Agustus 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522141 Belanja Sewa	870,480,000	0	454,770,000	133,920,000	588,690,000	67.63 %	281,790,000
000094. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (26 Orang x 12 Bln)	870,480,000	0	454,770,000	133,920,000	588,690,000	67.63 %	281,790,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
051.0A Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
521211 Belanja Bahan	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
000096. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	81,750,000	187,000	24,345,000	2,400,000	26,745,000	32.72 %	54,818,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	81,750,000	187,000	24,345,000	2,400,000	26,745,000	32.72 %	54,818,000
BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	81,750,000	187,000	24,345,000	2,400,000	26,745,000	32.72 %	54,818,000
AEA Koordinasi	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
051 Pelaksanaan Pengamanan Sidang	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
051.0A Pelaksanaan	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
521211 Belanja Bahan	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
000001. Konsumsi Pengamanan Sidang (25 org x 30 kali)	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	1,060,000	187,000	405,000	0	405,000	38.21 %	468,000
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,060,000	187,000	405,000	0	405,000	38.21 %	468,000
051 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	1,060,000	187,000	405,000	0	405,000	38.21 %	468,000
051.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	592,000	187,000	405,000	0	405,000	68.41 %	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	367,000	187,000	180,000	0	180,000	49.05 %	0
000002. Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	367,000	187,000	180,000	0	180,000	49.05 %	0
521211 Belanja Bahan	225,000	0	225,000	0	225,000	100.00 %	0
000003. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00 %	0
000004. Alat Tulis Kantor	125,000	0	125,000	0	125,000	100.00 %	0
051.0B Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	468,000	0	0	0	0	0.00 %	468,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000005. Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
521211 Belanja Bahan	208,000	0	0	0	0	0.00 %	208,000
000006. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	83,000	0	0	0	0	0.00 %	83,000
000007. Alat Tulis Kantor	125,000	0	0	0	0	0.00 %	125,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000
000008. Biaya Pemohonan Banding disetor ke PTTUN	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,000,000	0	15,660,000	2,400,000	18,060,000	54.73 %	14,940,000
QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33,000,000	0	15,660,000	2,400,000	18,060,000	54.73 %	14,940,000
051 Pos Bantuan Hukum	33,000,000	0	15,660,000	2,400,000	18,060,000	54.73 %	14,940,000
051.0A tanpa sub komponen	33,000,000	0	15,660,000	2,400,000	18,060,000	54.73 %	14,940,000
521211 Belanja Bahan	4,200,000	0	1,260,000	0	1,260,000	30.00 %	2,940,000
000009. ATK Layanan Pos Bantuan Hukum	4,200,000	0	1,260,000	0	1,260,000	30.00 %	2,940,000
522131 Belanja Jasa Konsultansi	28,800,000	0	14,400,000	2,400,000	16,800,000	58.33 %	12,000,000
000010. Jasa Layanan Konsultansi Hukum (3 Jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 Bln)	28,800,000	0	14,400,000	2,400,000	16,800,000	58.33 %	12,000,000
QCA Perkara Hukum Perseorangan	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
QCA.002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
051 Sidang di luar Gedung Pengadilan	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000011. Biaya Uang Kebersihan (3 Orang x 1 Kali)	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,390,000	0	0	0	0	0.00 %	17,390,000
000012. Transportasi 7 Org x 1 Keg	2,100,000	0	0	0	0	0.00 %	2,100,000
000013. Tiket 7 Org x 1 Keg	4,636,000	0	0	0	0	0.00 %	4,636,000
000014. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (7 Orang x 1 Malam x 1 Keg)	6,944,000	0	0	0	0	0.00 %	6,944,000
000015. Uang Harian (7 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan)	3,710,000	0	0	0	0	0.00 %	3,710,000



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Agustus 2025 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan seluruh Pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara profesional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPPIH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan sesuai dengan Pengumuman tanggal 14 Agustus tahun 2025 tentang proses presensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya dilakukan secara online melalui aplikasi SIKEP diharapkan semua Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan hal-hal yang disebutkan dalam pengumuman tersebut
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan rapat bulanan ini diadakan untuk evaluasi dan reviu tupoksi yang dilakukan oleh Hakim dan ASN.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kepada pegawai agar sadar diri dengan tupoksi yang sudah di tanda tangani pada pakta integritas setiap awal tahun.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk menjaga kebersihan pada masing-masing ruangan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan apabila ada yang izin baik itu cuti maupun izin keluar kantor untuk selalu memakai surat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk media sosial PTUN Jakarta diharapkan aktif serta *caption* atau berita yang disampaikan jelas dan memuat informasi pada kegiatan yang dilaksanakan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

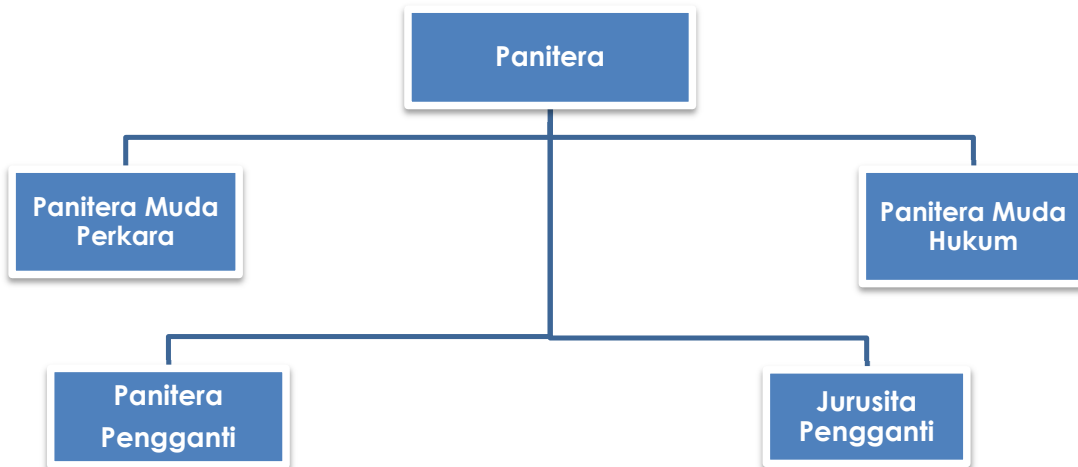
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan sedang memperjuangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tipe khusus dengan struktur organisasi yang sesuai.
 - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan Pelaksanaan Laporan Hakim Pengawas Bidang dilakukan 3 bulan sekali dan pada bulan ke tiga di awal bulan harus lengkap dengan jawaban tindak lanjut dari bagian yang diawasi.
 - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan agar Hakim dan Panitera Pengganti mengecek secara berkala SIPP jangan sampai ada yang merah.
 - Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan selamat kepada PPNPN yang akan dilantik menjadi PPPK.
 - Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan berkaitan dengan SMAP PTUN Jakarta SMAP walaupun PTUN Jakarta sudah paripurna namun tetap diwajibkan menjalankan setiap tahapan sosialisasi SMAP yang sudah memasuki tahap ke-4 yaitu audit internal, dan laporan dari audit internal akan dilaporkan kepada Bapak Ketua pada awal september 2025.
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.



B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.



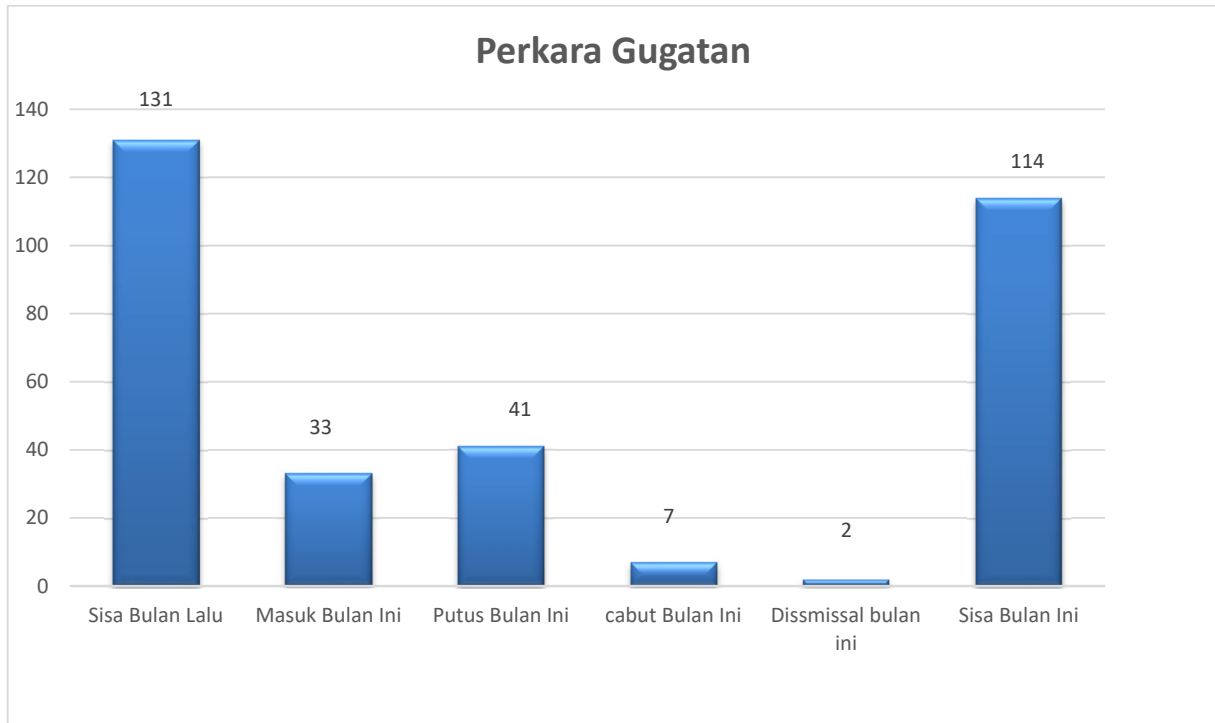
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

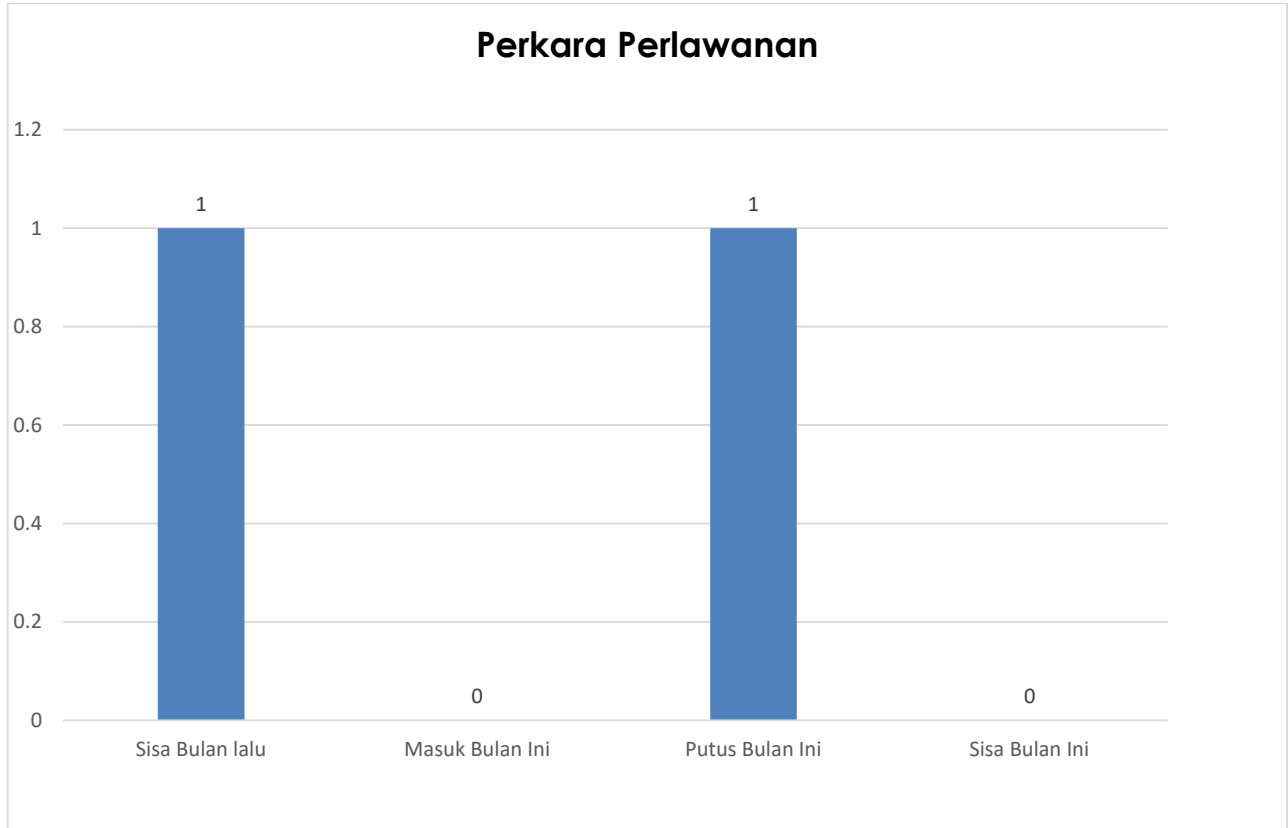
Keadaan Perkara



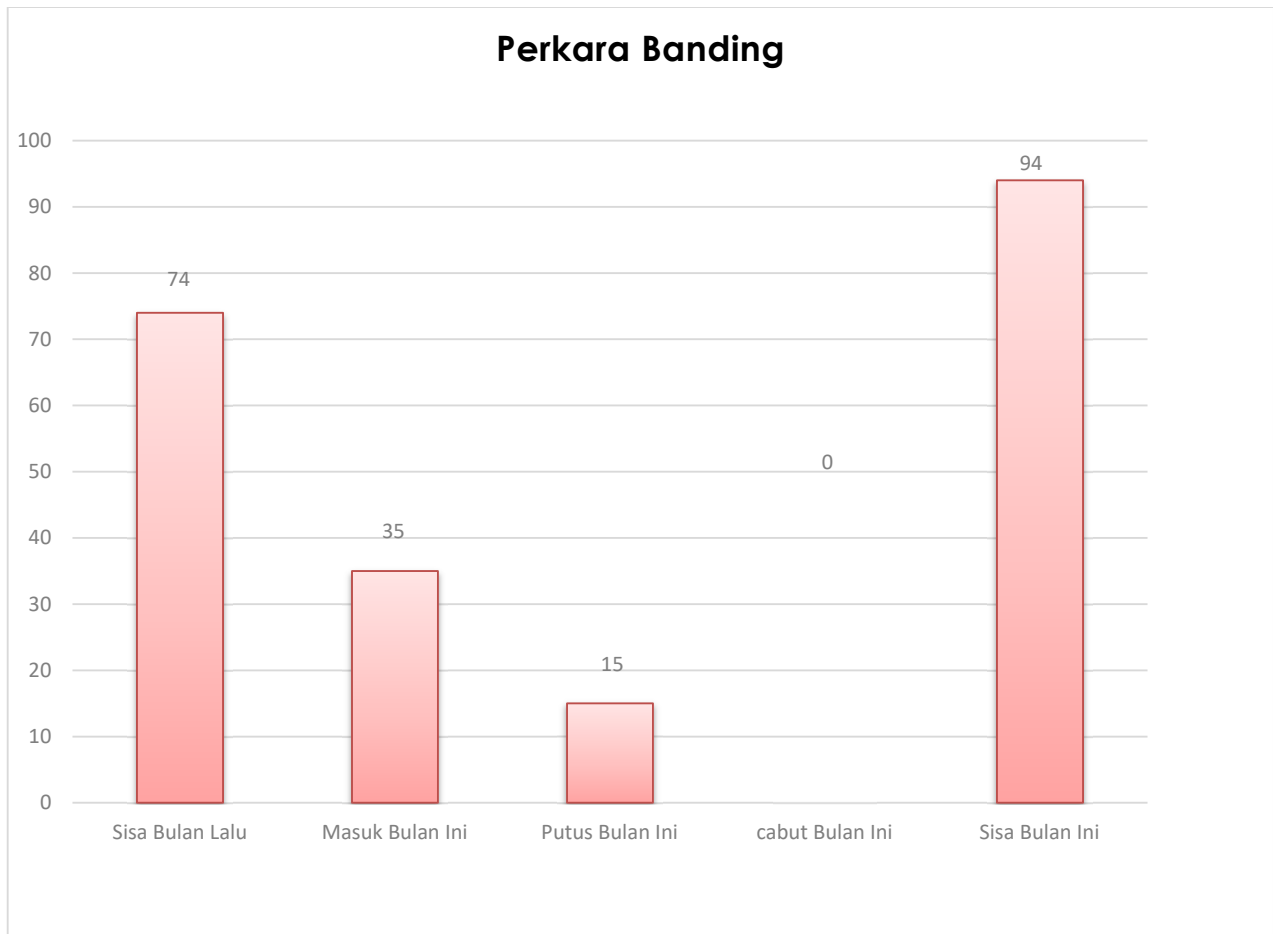
Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $9 + 4 + 42 = 55$ Perkara



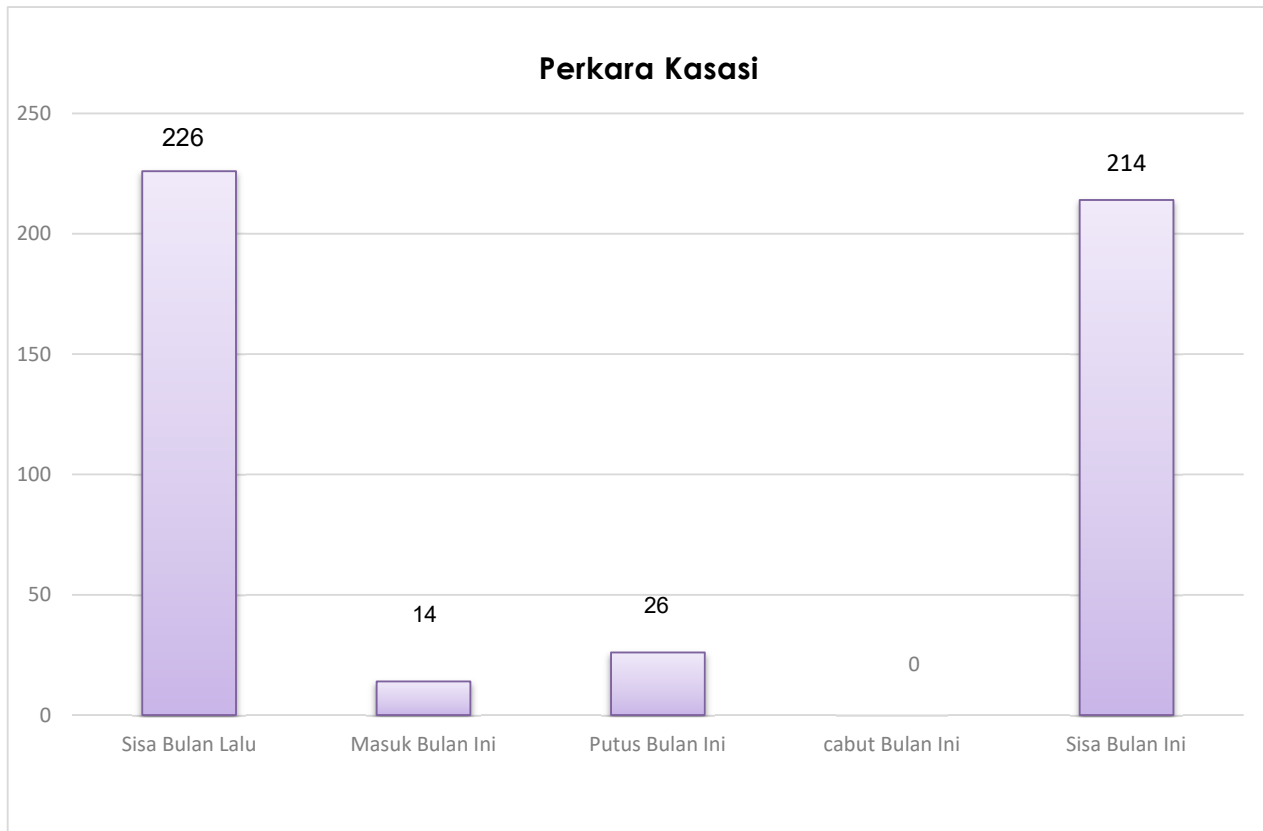
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Agustus 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

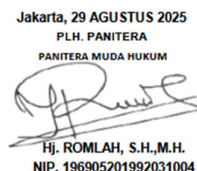
LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2025

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Ses Bulan Lalu	Perkara		Pengugat		Tergugat		Perlawanan		Putusan			Pemohonan		Terima Berkas		Keterangan									
			Masuk	Dituntut	Jumlah	Penanganan	Badan Hukum	Perorangan	Daerah	Perseorangan	Ditolak/Tidak Diketahui	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ses Perkara	Bandung	Kasasi		Peninjauan Kembali	Bandung	Kasasi	Peninjauan Kembali					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A GUGATAN																											
1	Pertanahan	18	4	1	21	4	-	-	4	-	-	-	-	-	2	3	1	6	15	3	2	1	-	3	3	-	-
2	Kepegawaian	18	2	-	20	2	-	2	-	-	-	-	-	-	7	-	7	13	7	1	-	-	1	-	-	-	-
3	Perjinaan	17	2	-	19	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	8	9	10	9	3	3	1	4	2	1	-	-
4	Lingkungan Hidup	2	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/ Parpol	23	5	-	28	1	4	5	-	-	-	-	-	1	6	1	8	20	2	3	2	-	1	2	-	-	
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	3	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	12	2	-	14	2	-	1	1	-	1	-	2	3	-	6	8	8	2	1	4	2	2	8	-	-	
17	Merek	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
18	Lain Lain	36	16	1	51	14	2	11	5	2	-	-	2	4	3	-	11	40	11	4	-	1	3	8	-	-	
JUMLAH		131	33	2	162	28	7	23	10	2	1	-	5	13	17	10	48	114	35	14	10	4	15	26	1	-	

MENGETAHUI
KETUA PTUN JAKARTA

H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992032002

Jakarta, 29 AGUSTUS 2025
PLH. PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM

Hj. ROMLAH, S.H., M.H.
NIP. 196905201992031004

- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Agustus 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA BULAN AGUSTUS TAHUN 2025

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 29 AGUSTUS 2025
KETUA PTUN JAKARTA

H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992032002



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

C. KEGIATAN LAIN – LAIN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan Upacara Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 14520/SEK/HM3.1.1/VIII/2025, perihal Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 dengan tema “**Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju**”. Upacara dilaksanakan tepat pukul 07.00 WIB di Halaman depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bertindak sebagai Pembina Upacara yaitu Bapak H. Husban, S.H., M.H. Upacara ini dirangkaikan dengan pemberian penghargaan Satya Lencana kepada Hakim dan Panitera Pengganti PTUN Jakarta yang telah memberikan pengabdian terbaiknya kepada Negara. Upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia diikuti oleh Wakil Ketua, Hakim, Pejabat struktural/Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan, seluruh ASN, PPPK dan PPNPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.



BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 76 ASN, dan 11 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Agustus 2025 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran Biaya Tambahan untuk Perawatan Gedung dan halaman, PC All in One, serta Meja Kerja.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).

Mengetahui

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Ketua PTUN Jakarta



HUSBAN

Jakarta, 09 September 2025

Plt. Sekretaris,

Tias Descariasty, S.H.

NIP. 198412092006042002

